

Kemenag Kembali Buka Seleksi Calon Mahasiswa S1 Timur Tengah

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama akan kembali membuka seleksi calon mahasiswa S1 untuk kuliah di Timur Tengah. Ada tiga negara tujuan, yaitu: Mesir, Sudan, dan Maroko. Kemenag membuka program beasiswa dan non beasiswa.

Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim saat membuka Rapat Koordinasi Seleksi Calon Mahasiswa S1 Timur Tengah, di Jakarta. Hadir, perwakilan Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Organisasi International Alumni Al-Azhar (OIAA).

"Rakor digelar sebagai persiapan untuk memastikan bahwa proses seleksi baik tulis dan wawancara dapat dilaksanakan dengan baik," jelas Arskal di Jakarta, Selasa (21/01).

"Proses seleksi rencananya akan dilaksanakan pada April 2020," lanjutnya.

Menurut Arskal, ada 160 kuota beasiswa S1 Mesir yang terdistribusi dalam empat jalur, yaitu: Kemenag (20 orang), Kedutaan Mesir (30), PBNU (30), dan Pondok Pesantren Gontor (80). Sementara untuk kuota beasiswa dari Sudan dan Maroko, diperkirakan seperti tahun lalu, masing-masing 20 orang.

Arskal minta seleksi tahun 2020 tetap berbasis komputer dengan lokal koneksi. Jadwal pelaksanaan seleksi tidak serentak, tapi dengan waktu berbeda antar satuan kerja penyelenggara. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada peserta dalam memilih beberapa alternatif pilihan lokasi.

"Kita harus menggali seluruh potensi yang kita miliki untuk menghasilkan hasil seleksi yang berkualitas yang akan membanggakan di masa yang akan datang," terangnya.

Selain tes tulis berbasis komputer, dilakukan juga proses wawancara. Arskal berharap wawancara dapat menggali dan memastikan calon mahasiswa baru ke Timur Tengah ini terbebas dari ekstrimisme yang menentang ideologi negara. "Komitmen kebangsaan harus menjadi bagian terpenting dalam proses seleksi ini sehingga para mahasiswa yang kembali ke Indonesia tetap menjadi penjaga ajaran Islam yang moderat," tuturnya.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad menyampaikan bahwa seleksi ini bertujuan untuk menyaring lulusan Madrasah Aliyah/Pondok Pesantren atau sekolah potensial untuk mengikuti studi ke negara Timur Tengah. Tujuan lainnya, mempersiapkan generasi terbaik dalam bidang ilmu keislaman dan Bahasa Arab dalam rangka melahirkan calon ilmuwan yang mumpuni dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai.

"Untuk model seleksi tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Waktu pelaksanaan tidak dilakukan secara bersamaan namun akan dilakukan dengan waktu dan soal yang berbeda di masing-masing lokasi. Untuk detail jadwal akan kita umumkan pasca disepakati bersama-sama," jelas Adib. (lip)

Sumber : Diktis

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512624/kemenag-kembali-buka-seleksi-calon-mahasiswa-s1-timur-tengah>

Perguruan Tinggi NU Siap Terlibat dalam Percepatan Pendidikan Islam

Jakarta (Kemenag) --- Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) siap terlibat dalam percepatan pemerataan pendidikan Islam. Hal ini disampaikan Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR PTNU) Masykuri Bakri saat bersilaturahmi dengan Menteri Agama Fachrul Razi, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

"Tujuan kami bersilaturahmi ke sini, menyambut statement Pak Presiden, bagaimana untuk mempercepat pemerataan pendidikan dan memangkas birokrasi," ujar Masykuri yang juga merupakan Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Rabu (22/01)

Menurut Masykuri pemerataan pendidikan Islam menjadi perhatian bagi PTNU yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Saat ini ada 258 Perguruan Tinggi NU se-Indonesia. Ada yang berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Kami juga memiliki 52 program pascasarjana," ungkap Masykuri yang hadir didampingi beberapa rektor perguruan tinggi islam swasta.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Staf Khusus Menteri Agama Ubaidillah, dan Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Arskal Salim ini.

Dalam kesempatan tersebut, Masykuri juga menyampaikan beberapa masukan terkait pengembangan pendidikan Islam, khususnya bagi perguruan tinggi islam swasta. "Ke depan kami harap ada tindak lanjut dari Kemenag untuk perbaikan mutu pendidikan," harap Masykuri.

Menag menyambut baik kesediaan dan komitmen PTNU untuk terlibat dalam pendidikan Islam. "Saya senang dengan kedatangan Bapak-Bapak. Terimakasih juga atas masukannya. Nanti akan kita tindaklanjuti, dan yang perlu perbaikan Akan kita perbaiki bersama," ujar Menag.

Sumber : -

Penulis : Indah Limy

Editor : Indah Limy

<https://kemenag.go.id/berita/read/512623/perguruan-tinggi-nu-siap-terlibat-dalam-percepatan-pendidikan-islam>



Rekrutmen Petugas Haji, Menag: Pilih yang Amanah dan Bertanggung Jawab

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama akan merekrut Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1441H/2020M. Menag Fachrul Razi mengingatkan agar petugas yang terpilih adalah mereka yang amanah dan bertanggung jawab.

“Pilih dan utamakan petugas yang memiliki sifat amanah, tanggung jawab, serta memiliki rasa kebersamaan,” pesan Menag saat menerima Direktur Bina Haji Khoirizi beserta jajarannya di Jakarta, Rabu (22/01).

Kehadiran Khoirizi dalam rangka melaporkan progres Rekrutmen PPIH serta penyediaan sarana prasarananya untuk musim haji 1441H/2020M. Menag juga berpesan agar petugas haji terbebas dari unsur yang mengarah pada ekstrimisme beragama.

Menag menilai, petugas haji berperan penting dalam proses pelayanan yang berdampak langsung pada kepuasan jemaah. Prestasi yang telah dicapai selama ini, tidak terlepas dari kinerja petugas haji. Karenanya, prestasi itu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menag juga minta agar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus berkoordinasi dan menjalin kerjasama baik dengan semua mitra yang terlibat dalam proses penyelenggaraan haji. “Pada intinya, apa yang sudah baik teruskan, yang kurang baik supaya diperbaiki sehingga memberikan kenyamanan kepada jemaah haji Indonesia,” ucap Menag.

Direktur Bina Haji Khoirizi memastikan rekrutmen petugas haji akan dilaksanakan secara terbuka dan berpedoman pada regulasi.

Sumber : -

Penulis : Bella

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512622/rekrutmen-petugas-haji--menag--pilih-yang-amanah-dan-bertanggung-jawab>



Bertemu Wamenag, Habib Nabil Undang Hadiri Giat Majelis Rasulullah

Jakarta (Kemenag) --- Pimpinan Majelis Rasulullah Habib Nabil Al Musawa berkunjung ke kantor Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. Kehadiran Habib Nabil untuk mengundang Wamenag menghadiri dua pengajian akbar Majelis Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an.

"Kami juga mengundang Wakil Presiden dan beberapa tokoh lainnya diacara tersebut," kata Habib Nabil kepada Wamenag di Jakarta, Rabu (22/01). Ikut mendampingi pertemuan, Staf Wamenag Saadullah Afif.

Pengajian Majelis Rasulullah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj rencananya digelar pada 27 Rajab 1441 H. Sedang peringatan Nuzulul Quran akan dilaksanakan pada 17 Ramadan 1441H. Kedua acara tersebut rencananya akan berlangsung di Silang Monas Jakarta.

Menurut Habib Nabil, acara tersebut juga akan dihadiri jamaah dari 5 negara yang sudah memiliki cabang Majelis Rasulullah, yakni: Malaysia, Singapura, Hongkong, Sydney, dan Maroko.

Kepada Wamenag, Habib Nabil juga menyampaikan bahwa Majelis Rasulullah akan fokus pada dakwah dengan kelembutan. "Kita tidak ikut-ikutan dengan yang lain. (Kita) Murni majelis akhlak, penuh kelembutan, tidak ikut demonstrasi, orasi-orasi. Kami Istiqamah mengajak orang kepada Allah, dekat kepada Allah," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Habib Nabil juga menyampaikan permohonan izin untuk menjadi penceramah tunggal dalam yang akan mengisi acara pada zikir akbar. "Kami menyampaikan surat permohonan izin penceramah," tandasnya.

Sumber : -

Penulis : Ruwaidah

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512621/bertemu-wamenag--habib-nabil-undang-hadiri-giat-majelis-rasulullah>



Menag Tegaskan Pemerintah Tak Atur Teks Khutbah

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk mengatur teks khutbah jumat. Menurutnya, apa yang pernah disampaikan hanyalah kebijakan yang berlaku di Uni Emirat Arab, bukan untuk diterapkan di Indonesia.

"Nggak ada. Saya cerita apa yang ada di negara-negara Arab. Tapi kita belum pernah mengadakan perubahan apapun," tegas Menag di Jakarta, Rabu (22/01).

"Kita kan bagus, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melihat orang lain gimana. Oh di Saudi, begini, di Emirat Arab begini. Apakah kita akan ubah? Saya nggak pernah bilang untuk mengubah kok," sambungnya.

Dikatakan Menag, pengalamannya saat berkunjung ke negara Arab sengaja diceritakan agar bisa menjadi tambahan pemahaman dan wawasan bagi jajarannya di Kemenag. "Udah pasti, udah saya bilang kan, saya cerita apa yang ada di negara Arab, tempat lahirnya nabi-nabi, Rasulullah, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab, silakan pahami itu. Nggak pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini," tandasnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi berbagi cerita tentang pertemuannya dengan Kepala Badan Urusan Agama Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed Matar Salem bin Abid Alkaabi di Abu Dhabi, 15 Desember 2019. Keduanya berdiskusi tentang penguatan moderasi beragama dan optimalisasi peran masjid.

Kepada Menag, Mohammed Matar Salem berbagi informasi seputar kebijakan pemilihan khatib Jumat dan penceramah di negaranya. Menurutnya, ada tiga tipologi khatib dan penceramah.

Pertama, khatib dan penceramah yang diberikan kebebasan untuk berkhotbah atau berceramah tanpa teks. Kedua, khatib dan penceramah yang diberikan kisi-kisi untuk selanjutnya dikembangkan oleh yang bersangkutan saat berceramah.

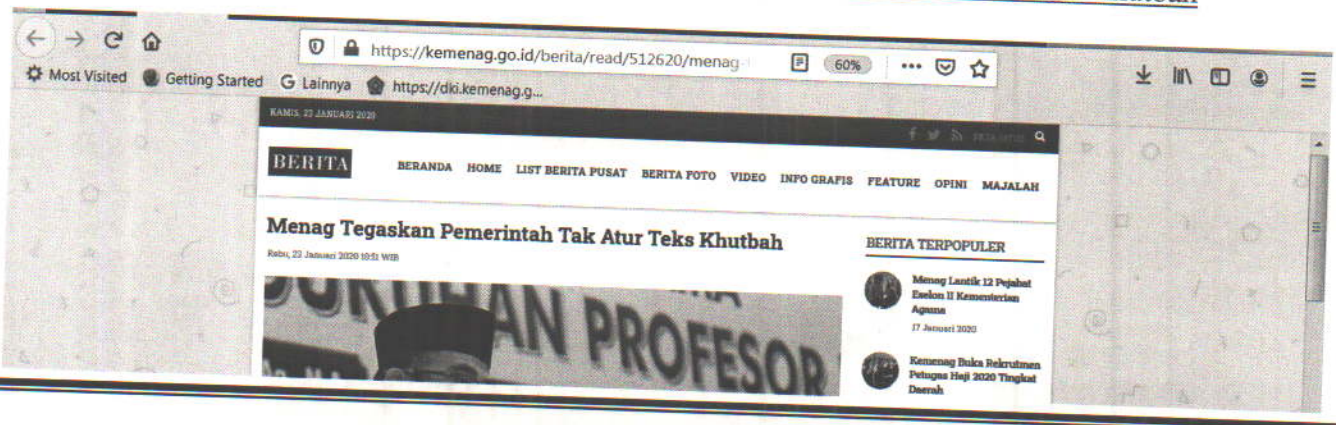
Ketiga, khotib dan penceramah yang hanya boleh membacakan naskah/teks yang disiapkan dan telah ditashih oleh General Authority of Islamic Affairs and Awqaf (Kementerian Urusan Agama Islam dan Waqaf).

Sumber : -

Penulis : Kontri

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512620/menag-tegaskan-pemerintah-tak-atur-teks-khutbah>



Sebagai UPT, Asrama Haji Diminta Terapkan Strategi Pemasaran Online

Tangerang Selatan (Kemenag) --- Asrama Haji merupakan satuan kerja Kementerian Agama yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sebagai UPT, asrama haji diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri.

Sehubungan itu, dalam pengelolaannya, Asrama Haji diminta untuk menerapkan strategi pemasaran berbasis online. Sebab, strategi pemasaran konvensional di era sekarang sudah ketinggalan dan tidak dibutuhkan.

Hal ini diungkapkan CEO & Managing Partner HAVPRO Group Ade Ahmad Rozi saat memberikan materinya pada Bimbingan Teknis Penyusunan dan Revisi Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2020 di Bintaro Tangerang Selatan. "Di era 4.0, Asrama haji sudah harus menerapkan strategi pemasaran online, karena pemasaran konvensional sudah tidak digunakan lagi," tegasnya, Rabu (22/10).

Menurutnya, keunggulan strategi pemasaran berbasis online (Ecommerce) adalah produk yang dipasarkan (asrama) dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Untuk itu, UPT Asrama Haji perlu mengoptimalkan website, Search Engine Optimization (SEO), Content Marketing, Email Marketing, Social Media Marketing, dan Pay Per Click (PPC).

"Perlu keberadaan kita di internet, jika produk kita tidak berada di internet maka akan tergilas. Ecommerce berkembang sangat cepat, sehingga informasi-informasi tentang asrama haji dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama 24 jam," terangnya.

"Komunikasi pemasarannya di era 4.0 ini jangan bersifat cetakan saja (brosur, leaflet) tapi bisa dimunculkan di website," tambahnya.

Selain online, asrama haji juga harus menerapkan konsep pemasaran yang berfokus pada Segmentasi, Targeting dan Positioning (STP). Untuk itu, diperlukan identifikasi segmen dan target pegguan. "Jangan semua segmentasinya diambil," ujarnya.

Kepala UPT Asrama Haji Lombok Abdul Razak Alfakhir mengaku pendapatannya saat ini masih bergantung dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa sewa kamar dan gedung asrama. Tantangannya, saat low session harus bersaing dengan hotel lain yang berani menurunkan harga kamar.

"Saat low session kita harus bersaing dengan hotel-hotel lain yang berani menurunkan harganya. Kita tidak bisa ikut menutunkan karena dibatasi regulasi PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama," kata Razak.

Sumber : -

Penulis : Husni Anggoro

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512619/sebagai-upt--asrama-haji-diminta-terapkan-strategi-pemasaran-online>

Kakanwil : Buat Terobosan Dan Bangun Networking Untuk Meningkatkan Kualitas Guru

Jakarta (Inmas) --- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Saiful Mujab berharap, anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) membuat suatu terobosan dan membangun networking dengan perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas guru.

Hal ini disampaikan saat memberikan materi pada kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan MGMP Biologi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta.Selasa (21/01)

“Bagaimana menciptakan generasi yang baik dalam meningkatkan prestasi siswa,” ujarnya.

Kakanwil menuturkan kegiatan MGMP dapat dihargai untuk studi lanjut bagi guru, maka perlu diadakan standarisasi penyelenggaraan MGMP. Mengingat perannya sangat penting dalam pengembangan profesionalisme guru.

“Dan pelaksanaan kegiatan MGMP lebih terarah,” jelasnya.

Saiful mengingatkan bahwa peran MGMP dalam mengembangkan profesionalitas guru menjadi lebih penting usai pemerintah memberlakukan kurikulum baru. Dan menjadi wadah vital bagi guru untuk mereform dirinya agar mampu menyiapkan peserta didik yang tangguh, kreatif, kritis, dan terampil.

”Untuk itu diharapkan pendekatan proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa,” imbuhnya.

Mengenai berbagai inovasi pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), CBSA (*Student Active Learning*), *Problem Solving (Problem-Based Learning)*, Kakanwil berharap dikuasai guru dengan baik.

“Guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran,” terangnya dihadapan 30 peserta.

Referensi :

Penulis : Fajar

Dibaca: 3 kali

<https://dki.kemenag.go.id/berita/kakanwil-buat-terobosan-dan-bangun-networking-untuk-meningkatkan-kualitas-guru>



Most Visited Getting Started Lainnya <https://dki.kemenag.g...>

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

PROFIL • PUBLIKASI • REGULASI • INFORMASI • LINKS • PID • RI/2L • KONTAK • MATERI POWER POINT

Kakanwil : Buat Terobosan Dan Bangun Networking Untuk Meningkatkan Kualitas Guru

Admin / 22 Jan 2020, 08:35

Berita Populer

- Pakaian Dinas ASN Kemenag, Tindaklanjut Raker Kanwil Kemenag DKI Jakarta**
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat / 25 Mar 2019
- Jakarta (Inmas JP) - Kepala Kankemenag Kota Jakarta Pusat, H. Mukhobar memberikan ...** Selengkapnya >
- Kakanwil Kemenag DKI Melantik Eselon IV dan Kepala Madrasah**
Admin / 12 Oct 2018
- Jakarta (Inmas) --- Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Saiful Mujab melantik sejumlah ...** Selengkapnya >

Ajukan Tambahan 10.000 Kuota Haji, Menag Minta Jokowi Lobi Raja Salman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk turut melobi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz agar menambah kuota haji Indonesia pada tahun 2020 ini. "Saya tahu Bapak Presiden dekat dengan Raja Saudi.

Saya minta tolong beliau untuk membantu untuk mem-back-up kita, mengajukan tambahan 10.000 jemaah," kata Fachrul setelah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Fachrul, kuota haji Indonesia sebesar 221.000 memang harus ditambah untuk memangkas antrean jemaah yang hendak beribadah ke Arab Saudi.

Presiden pun setuju agar Indonesia kembali mengajukan tambahan kuota. "Saya minta tambahan 10.000. Dia (Presiden) bilang boleh, tetapi ajukan saja secara formal," kata Fachrul.

Kendati demikian, Fachrul menilai, komunikasi informal juga diperlukan agar pengajuan tambahan kuota ini berjalan mulus.

Oleh karena itu, Fachrul berharap Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali bertemu Raja Salman bisa ikut membuka upaya komunikasi. "Mudah-mudahan ya akan komunikasikan dengan Raja Saudi," kata dia. Baca berikutnya

Penulis : Ihsanuddin

Editor : Icha Rastika

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/11371121/ajukan-tambahan-10000-kuota-haji-menag-minta-jokowi-lobi-raja-salman>



Menag Tepis Wacana Khotbah Jumat Diatur : Saya Cerita Yang Ada Disaudi

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan pemerintah tak akan mengatur teks khotbah Jumat. Fachrul mengatakan dirinya hanya bercerita mengenai praktik keagamaan di negara lain.

"Nggak ada. Saya cerita yang ada di Saudi. Apa yang ada di negara-negara Arab. Tapi kita belum pernah mengadakan perubahan apapun. Kita kan bagus kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melihat orang lain gimana. Oh di Saudi, begini, di Emirat Arab begini. Apakah kita akan ubah? Saya nggak pernah bilang untuk mengubah kok," kata Fachrul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Fachrul juga menegaskan tak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengubah ketentuan khotbah Jumat di Indonesia. Cerita kunjungannya di Saudi, kata Fachrul, sebatas untuk pemahaman jajarannya di Kemenag.

"Udah pasti, udah saya bilang kan, saya cerita apa yang ada di Saudi, negara Arab, tempat lahirnya nabi-nabi, Rasulullah, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab, silakan pahami itu. Nggak pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pengaturan teks khotbah Jumat disampaikan Kepala Kemenag Kantor Wilayah Kota Bandung Yusuf Umar. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah.

Yusuf Umar mengatakan wacana ini berdasarkan instruksi Menteri Agama. Menurut dia, berdasarkan studi banding yang dilakukan Menag ke Abu Dhabi, khatib-khatib masjid di sana berkhotbah sesuai dengan teks yang disediakan pemerintah.

"Jadi mungkin hasil studi banding Pak Menteri Agama di Abu Dhabi, nah itu coba bisa nggak dikondisikan di daerah. Saya kan sebagai pelaksana kebijakan di Kota Bandung, ini dari Pak Menteri ketika ada pengarahan beliau," ucap Yusuf kepada detikcom, Selasa (21/1).

(knv/azr)

<https://news.detik.com/berita/d-4868579/menag-tepis-wacana-khotbah-jumat-diatur-saya-cerita-yang-ada-di-saudi>

Most Visited Getting Started Lainnya <https://dki.kemenag.g...>

MENU Cari Berita

d Home Berita Daerah Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra Infografis Foto Video Indeks

Adsmart * Terpopuler Hoax or Not Suara Pembaca

detikNews > Berita

Menag Tepis Wacana Khotbah Jumat Diatur: Saya Cerita yang Ada di Saudi

Berita Terpopuler

#1 Herannya Polisi Dendaar Cerita

Menag Minta Jokowi Lobi Raja Arab Tambah Kuota Jemaah Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama (Menag) **Fachrul Razi** mengaku meminta Presiden Joko Widodo (**Jokowi**) 'melobi' Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud agar mau menambahkan kuota jemaah **haji** sebanyak 10 ribu orang.

Fachrul menyebut permintaan itu diajukan karena Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman.

"Saya minta tolong beliau untuk membantu untuk mem-*back up* kami mengajukan tambahan 10 ribu jemaah itu. Mudah-mudahan. Ya akan komunikasikan dengan Raja Saudi," kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Fachrul menyebut ketentuan penambahan kuota haji Indonesia ini juga perlu dibahas di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mengaku sudah menyampaikan langsung kepada pemerintah Arab Saudi soal penambahan kuota 10 ribu jemaah haji RI.

"Saya minta tambahan 10 ribu. Dia bilang boleh. Tapi ajukan aja secara formal. Bukan tambahan kuota tapi menjadi tambahan jemaah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan haji yang telah ditandatangani Fachrul dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benteen, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 221 ribu kursi untuk 2020.

Fachrul pun optimistis Pemerintah Arab Saudi akan menambah kuota haji Indonesia tahun ini menjadi 231 ribu. Ia mengatakan pihak Saudi memahami kebutuhan RI soal kuota haji dan siap memberikan kuota tambahan.

"Pihak Saudi memahami kebutuhan Indonesia untuk tambahan kuota. Mereka minta agar kita mengajukan secara khusus dan akan dipertimbangkan. Kalau saya lihat, mereka sudah siap untuk ngasih," kata Fachrul dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
(fra/bmw)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200122185150-20-467793/menag-minta-jokowi-lobi-raja-arab-tambah-kuota-jemaah-haji>

Home > Nasional > Berita Peristiwa

Menag Minta Jokowi Lobi Raja Arab Tambah Kuota Jemaah Haji

CNN Indonesia | Rabu, 22/01/2020 20:04 WIB

Bagikan :

GRAND WISATA BEKASI
COMING SOON
living world
For inquiry call
021 2908 8000 / 826 222 773
www.grandwisatabekasi.com

Menag Minta Bantuan Jokowi Lobi Raja Salman Tambah 10 Ribu Jemaah Haji

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melobi Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud terkait penambahan jumlah jemaah haji sebanyak 10 ribu. Fachrul mengatakan Jokowi mempunyai kedekatan khusus dengan Raja Salman.

"Nah karena saya tahu Bapak Presiden dekat dengan Raja Saudi. Saya minta tolong beliau untuk membantu untuk membackup kita mengajukan tambahan 10 ribu jemaah itu. Mudah-mudahan. 'Ya akan komunikasikan dengan Raja Saudi'," kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Fachrul mengatakan penambahan 10 ribu jemaah haji ini di luar kuota jemaah haji yang telah ditentukan. Menurut dia, penambahan kuota jemaah haji merupakan kewenangan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Pernah kan Saudi mengatakan masalah Saudi tak punya kewenangan menambah kuota. Jadi kuota yang menentukan OKI. OKI menentukan 221 ribu buat Indonesia. Saya minta tambahan 10 ribu. Dia bilang boleh. Tapi ajukan aja secara formal. Bukan tambahan kuota tapi menjadi tambahan jemaah," ujar dia.

Selain Fachrul, Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri membahas mengenai anggaran untuk haji.

"Tadi Pak Menteri Agama mengenai tarif untuk haji dari sisi kebutuhan anggarannya," pungkas Fachrul. (knv/mae)

<https://news.detik.com/berita/d-4868610/menag-minta-bantuan-jokowi-lobi-raja-salman-tambah-10-ribu-jemaah-haji>



Menag soal Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal: Dibuat Efisien

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi angkat bicara mengenai draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menghapus kewajiban makanan harus bersertifikat halal. Fachrul menegaskan kewajiban sertifikat itu tak dihapus, melainkan diubah supaya prosesnya lebih cepat.

"Oh nggak, nggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien. Karena yang lalu kan... Bapak Presiden begini, nggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Semuanya dalam proses. Nggak ada dalam proses. Harus ada kepastian. Bagus sekali niat beliau itu. Jadi setelah dirumuskan baik, didiskusikan," kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Fachrul mengatakan sertifikat halal tetap ada. Pemerintah, kata Fachrul, hanya ingin menyederhanakan proses supaya ada kepastian untuk masyarakat.

"Tetap. Tapi nanti kita lihat bagaimana mempercepatnya dan bagaimana supaya ada kepastian," ujar dia.

Fachrul mengatakan sampai saat ini pihaknya masih merumuskan aturan tersebut. Setelah rampung, Fachrul akan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

"Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang didapat **detikcom**, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus, yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu:

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
- b. nama dan jenis Produk;
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.---

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.*
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.*
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

(knv/asp)

<https://news.detik.com/berita/d-4868562/menag-soal-omnibus-law-hapus-kewajiban-sertifikat-halal-dibuat-efisien>

The screenshot shows a web browser displaying a news article. The browser's address bar shows the URL: <https://news.detik.com/berita/d-4868562/menag-soal-omnibus-law-hapus-kewajiban-sertifikat-halal-dibuat-efisien>. The article title is "Menag soal Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal: Dibuat Efisien" by Kanavino Ahmad Rizqo, published on Wednesday, January 22, 2020, at 11:14 WIB. There are 14 comments and share buttons for Facebook, Twitter, and WhatsApp. Below the article is a video player showing a man looking at a document. To the right is a real estate advertisement for "CIMANGGIS GOLF ESTATE" with a price starting at 1M-an and a monthly installment of 5JT-an.

Menag Pastikan Serifikasi Halal Tak Dihapus

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi menampik anggapan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal menghapus kewajiban sertifikasi halal.

Fachrul Razi mengatakan pada prinsipnya keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dalam hal ini, dia menilai keberadaan kewajiban sertifikasi halal juga harus transparan dan tidak menghambat percepatan yang ada.

“Oh enggak, enggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien. Karena yang lalu kan, Bapak Presiden begini, enggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Semuanya dalam proses. Enggak ada dalam proses. Harus ada kepastian,” kata Menag di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2020).

Intinya, dia menekankan proses sertifikasi halal harus cepat sehingga menciptakan kepastian berusaha di Indonesia. Sejauh ini, dia menilai revisi pasal-pasal terkait masih terus dibahas sehingga belum ada kepastian terkait hal tersebut.

“Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

Berdasarkan draf yang diperoleh **Bisnis.com** pada Selasa (21/01/2020), tercantum dalam Pasal 552 bahwa empat pasal dalam Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 akan dihapuskan bersama puluhan pasal dalam UU lainnya.

Adapun Pasal 4 mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang masuk dan beredar di Tanah Air.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200122/12/1192804/menag-pastikan-serifikasi-halal-tak-dihapus>

The screenshot shows the top portion of a web browser displaying the article. At the top, there is a navigation bar with categories: MARKET, FINANSIAL, EKONOMI, TRAVEL, SPORT, BOLA, OTOMOTIF. Below this is a search bar and a notification banner that says "Ikuti terus berita terbaru dari Bisnis.com" with a "Ya" button and a "Lain Kali" button. The main header of the page features the "Ekonomi" logo and the text "EKONOMI". Below the header, the breadcrumb "Home > Ekonomi > Jasa & Niaga" is visible. The article title "Menag Pastikan Serifikasi Halal Tak Dihapus" is prominently displayed in large, bold black font. To the right of the title, there is a small graphic with the text "Cuan ata" and an illustration of a bull's head. Below the title, the first paragraph of the article is visible, starting with "Fachrul Razi mengatakan pada prinsipnya keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dia menilai keberadaan kewajiban sertifikasi halal juga harus transparan dan tidak menghambat percepatan yang ada."

Jokowi Harus Bantu Melobi Raja Salman

□ Agar Kuota Haji Bertambah

JAKARTA (Pos Kota) - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, meminta Presiden Jokowi ikut membantu melobi Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, agar kuota haji Indonesia bisa bertambah pada tahun ini.

"Saya tahu Bapak Presiden dekat dengan Raja Saudi. Saya minta tolong beliau membantu mem-back-up kita, mengajukan tambahan 10.000 jemaah," katanya, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Saat ini, Fachrul mengaku kuota haji Indonesia hanya sebesar 221.000. Sehingga harus ditambah untuk memangkas antrean panjang jemaah yang hendak beribadah ke Arab Saudi.

SECARA FORMAL

Presiden pun setuju agar Indonesia kembali mengajukan tambahan kuota.

"Saya minta tambahan 10.000. Dia (Presiden) bilang boleh, tetapi ajukan saja secara formal," jelasnya.

Kendati demikian, Fachrul mengaku komunikasi informal juga diperlukan agar pengajuan tambahan kuota ini berjalan mulus.

Karena itu, dirinya berharap Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali bertemu Raja Salman bisa ikut membuka upaya komunikasi. (johara/bi)

Wantim MUI Minta *Omnibus Law* Sejalan Konstitusi

JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Prof Din Syamsuddin mengingatkan agar kebijakan terkait *Omnibus Law* tidak menyimpang dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. *Omnibus Law*, menurut dia, harus tetap pada komitmen kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

"Jangan sampai demi investasi dan penderhanaan, tapi menabrak nilai-nilai dasar yang ada di Undang-Undang Dasar. Kita tidak pada posisi suuzon, menolak, menghalangi, tidak, tapi hanya mengingatkan," ujar dia di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/1).

Mengutip penelitian di Universitas Padjadjaran, Din menyebut, pada era reformasi ada 115 undang-undang (UU) yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga jihad konstitusi pun dilakukan dengan *judicial review*. "Dan, sekarang belum ada perbaikan," kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

Din juga mengatakan, dari informasi yang beredar, sudah mulai ada gelagat atau gejala-gejala yang menabrak ketentuan-ketentuan yang sudah ada. "Dan, tentu masyarakat termasuk umat Islam akan protes nanti jika ada ketentuan-ketentuan yang sudah baku kemudian ditabrak," katanya.

Sejumlah kalangan, kata Din, menilai *Omnibus Law* berpeluang mem-

beri karpet merah pada investor asing dan mematikan pengusaha domestik. Jika ini yang terjadi, menurutnya, jelas keliru. Apalagi, jika *Omnibus Law* hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menguasai bisnis dan investasi untuk kepentingannya sendiri.

"Bukan untuk rakyat, untuk kepentingan dia sendiri, miliknya sendiri. Ini harus betul-betul dicatat kalau itu terjadi," ucapnya.

Rencananya, Din bersama Wantim MUI akan mendalami *Omnibus Law* dengan mengundang pakar-pakar hukum. "Insya Allah akan dibahas lebih luas lagi dengan mengundang ahlinya pada rapat pleno ke-49 pada 12 Feb-

ruari," ungkap dia.

Sementara itu, terkait Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan digelar MUI pada 26-29 Februari mendatang di Bangka Belitung, Din berharap, forum tersebut dapat membuat umat Islam lebih maksimal berperan dalam konteks kebangsaan.

Din mengatakan, KUII ke-7 membahas masalah strategis umat Islam dengan materi utama, yaitu tentang strategi perjuangan umat Islam untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat.

"Ini tema yang sesungguhnya sudah dibicarakan pada KUII sebelumnya dan merupakan manifestasi tanggung jawab

umat Islam untuk mengisi negara bangsa yang berdasarkan Pancasila ini karena bagi umat Islam, negara Pancasila itu merupakan *daarul akhdi wa syahadah* (negara kesepakatan dan pembuktian)," ujarnya.

Bagi Din, umat Islam Indonesia mempunyai komitmen yang sangat besar untuk mengisi negara Pancasila ini menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

"Bagaimana strateginya, itu yang dibahas. Tentu dalam strategi perjuangan umat Islam itu belum final, bagaimana perjuangan umat Islam dalam membangun NKRI yang berdasarkan Pancasila ini." ■ ed: wachidah handasah

Menag: Pemerintah tak Atur Isi Khutbah

● UMAR MUKHTAR

Penyeragaman khutbah dinilai bukan cara tepat menghadapi radikalisme.

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan, tidak ada rencana pemerintah mengatur teks khutbah Jumat. Menurutnya, apa yang pernah disampaikan hanyalah kebijakan yang berlaku di Uni Emirat Arab (UEA), bukan untuk diterapkan di Indonesia.

"*Nggak* ada. Saya cerita apa yang ada di negara-negara Arab, tapi kita belum pernah mengadakan perubahan apa pun," ujar Menag di Jakarta, Rabu (22/1).

"Kita *kan* bagus, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melihat orang lain gimana. Oh di Saudi begini, di Emirat Arab begini. Apakah kita akan ubah? Saya *nggak* pernah bilang untuk mengubah *kok*," kata dia seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Pengalamannya saat berkunjung ke negara Arab, menurut Menag, sengaja diceritakan agar bisa menjadi tambahan pemahaman dan wawasan bagi jajarannya di Kemenag. "*Udah* pasti, *udah* saya bilang kan, saya cerita apa yang ada di negara Arab, tempat lahirnya nabi-nabi, Rasulullah, apa yang ada di negara Arab lainnya, apa yang ada di Emirat Arab, silakan pahami itu. *Nggak* pernah saya katakan nanti di Indonesia akan begini," ujarnya.

Sebelumnya, dalam suatu acara, Menag berbagi cerita tentang pertemuannya dengan Kepala Badan Urusan Agama Islam dan Wakaf UEA, Mohammed Matar Salem bin Abid Alkaabi di Abu Dhabi pada 15 Desember 2019. Mereka berdiskusi tentang penguatan moderasi beragama dan optimalisasi peran masjid.

Kepada Menag, Mohammed Matar Salem berbagi informasi seputar kebijakan pemilihan khatib Jumat dan penceramah di negaranya. Menurutnya, ada tiga tipologi khatib dan penceramah.

Pertama, khatib dan penceramah diberikan kebebasan untuk berkhotbah atau berceramah tanpa teks. Kedua, khatib dan penceramah diberikan kisi-kisi untuk selanjutnya dikembangkan oleh yang bersangkutan saat berceramah.

Ketiga, khatib dan penceramah hanya boleh membacakan naskah/teks yang disiapkan dan telah ditahsil oleh General Authority of Islamic Affairs and Awqaf (Kementerian Urusan Agama Islam dan Wakaf).

Mengenai materi khutbah, cendekiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra juga angkat bicara terkait rencana pengaturan materi khutbah oleh Kantor Kemenag Kota Bandung. Dia pun mempertanyakan urgensi penyeragaman materi khutbah.

"Untuk apa (pengaturan materi khutbah). Kementerian Agama *kan* punya pengawas, penyuluh agama itu. Jadi, penyuluh agama saja itu yang datang ke masjid, lihat ada khatib atau ustaz yang keras-keras, dikasih dialog. Jadi, ditanganinya kasus per kasus saja," ujar Azyumardi kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menilai, sebagian besar khatib dan penceramah itu baik-baik dan damai-damai. "Jadi, satu-dua saja yang keras-keras, jadi jangan hanya karena ada kasus seperti itu lalu dibikin kebijakan. Saya kira negara juga tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu," kata dia.

Seharusnya, menurut Azyumar-

di, Kemenag melakukan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih produktif dalam menghadapi gejala radikalisme di kalangan guru ataupun ustaz. Caranya, bukan dengan menyeragamkan khutbah.

"Lakukanlah lokakarya kebangsaan, keislaman, itu yang harus dilakukan. Panggil semua ustaz, kumpul-kumpul sambil makan-makan, bikin suasana yang enak, diskusi mengenai kebangsaan, *hubbul wathan minal iman*, itu yang harus dilakukan," ujar wakil ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI itu.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung Yusuf Umar mengatakan, pihaknya berencana mengatur isi khutbah shalat Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Wacana tersebut mengacu pada Kota Abu Dhabi, UEA.

Di Abu Dhabi, kata Yusuf, khutbah Jumat diatur dengan tujuan bersama-sama mendoakan pemerintah dalam setiap urusan. Juga, agar dapat menyejukkan jamaah sidang Jumat. "Ini dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*," kata Yusuf.

■ ed: wachidah handasah

Tahun Ini Jamaah Dua Embarkasi Gunakan E-Money

● IDEALISA MASYRAFINA

JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan melakukan uji coba pengembangan *virtual account* sebagai media *cashless* haji pada tahun ini. Uji coba akan dilakukan di dua embarkasi, yakni Embarkasi Jakarta dan Jawa Barat.

"*Cashless* tahun ini tahapannya baru uji coba di dua embarkasi dulu, Jakarta dan Jawa Barat. Masih di-*profiling* dulu jamaah hajinya," ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Ahmad Iskandar Zulkarnain dalam paparan kinerja BPKH 2019 di Jakarta, Rabu (22/1).

Saat ini, kata dia, fungsi *virtual account* masih sebatas informasi dan distribusi nilai manfaat jamaah tunggu. Tahun ini, *cashless* ditargetkan dapat juga digunakan sebagai media pembayaran

dan *source of fund e-wallet* atau *e-money*.

Nantinya, media *cashless* akan berupa *e-money*, ATM atau kartu debit. Kartu tersebut dapat diisi dengan *living cost* yang diberikan kepada jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kartu tersebut juga dapat di *top-up* oleh jamaah.

Adapun penggunaannya dapat untuk membayar dan dapat dikonversi dari rupiah ke riyal, begitupun sebaliknya. Dana *cashless* pun dapat ditarik tunai di Arab Saudi.

Kartu ini, lanjut Iskandar, juga dirancang agar bisa memberikan berbagai promo menarik bagi jamaah, dapat digunakan untuk alat pembayaran dan belanja. Ke depan juga akan diintegrasikan dengan *mobile apps*.

"Banknya belum diputuskan, harus yang bisa cocok dengan transaksi di

Arab Saudi," kata Iskandar.

Selain untuk memudahkan, *cashless* ini diharapkan memberikan efisiensi dalam pengadaan rupiah ke riyal, serta distribusi dana tersebut ke jamaah.

"Apalagi, untuk pengadaan riyal dalam jumlah besar, harus melalui impor dari Arab Saudi dan pendistribusiannya ke perbankan syariah juga memerlukan biaya yang besar," katanya.

Saat ini, BPKH tengah melakukan tahap sosialisasi untuk *cashless*. Sebab, berdasarkan *profiling*, sekitar 42 persen jamaah haji adalah lulusan SD dan SMP, dan sebanyak 76 persen berusia lanjut, sehingga tidak familiar dengan uang elektronik.

Sementara itu, dalam paparan kinerja keuangan BPKH 2019, Anggota BPKH Bidang Keuangan Acep Triana mengungkapkan, nilai manfaat dana

kelolaan BPKH naik 27,9 persen, yakni sebesar Rp 7,2 triliun pada 2019 dari Rp 5,8 triliun pada 2018. Nilai manfaat tersebut berasal dari dana kelolaan yang sebesar Rp 125 triliun, naik 10,6 persen dari Rp 113 triliun.

Menurut Acep, nilai tersebut berasal dari alokasi penempatan dana kelolaan di bank serta investasi langsung dan lainnya. "Pada 2018 lebih banyak penempatan di bank syariah, dan pada tahun 2019 kami geser ke investasi karena nilai manfaatnya lebih besar," kata dia.

Dari nilai manfaat yang didapatkan pada 2019, penempatan di bank syariah menghasilkan nilai manfaat sebesar Rp 2,95 triliun, sedangkan nilai manfaat dari investasi mencapai Rp 4,34 triliun. Dengan besarnya nilai manfaat dari investasi ini, pada tahun 2020 BPKH akan lebih memaksimalkan ke investasi

langsung dan lainnya.

"Tahun 2020, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp 132 triliun dan nilai manfaat Rp 8 triliun. Kenaikan dana kelolaan ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar untuk investasi," ujar Kepala BPKH, Anggito Abimanyu.

Anggito menegaskan, instrumen investasi yang dipilih BPKH termasuk aman dan berisiko rendah. Beberapa investasi tersebut, yakni di surat berharga syariah negara dan korporasi atau sukuk, reksadana pendapatan tetap terproteksi (RDPT) serta investasi langsung di Arab Saudi.

Tahun ini BPKH akan mulai melakukan investasi langsung dengan porsi Rp 7 triliun, dan Rp 10 triliun investasi di surat berharga negara, korporasi hingga RDPT. ■ ed: wachidah handasah